

**PERANAN AUDIT MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA**

SKRIPSI

Oleh
RISMAWATI
105730536515



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

**PERANAN AUDIT MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA**

**Oleh
RISMAWATI
105730536515**



*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jadikan Sabar dan Sholat Sebagai Penolongmu”

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan kepada ALLAH SWT yang maha kuasa, berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi ku pada orang-orang tersayang:

Kedua orang tuaku, Bapak (M. Jafar) dan Ibundaku (Niar) Tercinta yang tak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, dan pengorbanan dalam hidup ini. Terima kasih buat Kaeng dan Mama.

Kakakku beserta suaminya dan keponakan ku yang selalu menjadi pengobat lelahku dalam menjalani hari-hariku. Sahabat seperjuanganku yang selalu memberikan semangat dan dukungan, serta canda tawa yang sangat mengesankan selama perkuliahan.

Terima Kasih kalian semua.

“Orang yang merendahkanku”

Pendidikan memang tidak menjamin seseorang untuk menjadi orang yang kaya dan sukses, tapi dengan pendidikan akan membuka jalan dan menuju arah yang lebih baik, Terima Kasih atas ucapan yang kalian lontarkan untukku karena telah menjadi motivasi yang sangat berharga untuk menambah semangat ku dalam menuntut ilmu dan mewujudkan cita-citaku dalam membahagiakan kedua orang tuaku.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972.Makassar.



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Peranan Audit Manajemen Dalam Meningkatkan
Penerimaan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bulukumba."

Nama Mahasiswa : Rismawati
No. Stambuk/NIM : 105730536515
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didapan Panitia
Penguji Skripsi Strata 1 (S1) pada hari Sabtu, 24 Agustus 2019 di ruangan IQ.7.1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Edi Jusriadi, SE, MM
NIDN : 0922027901

Pembimbing II

Dr. Ismail Badolahi, SE, M.Si, Ak, CA, CSP
NEM : 1073428

Mengetahui,

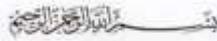
Kelembagaan Program Studi Akuntansi

Dr. Ismail Badolahi, SE, M.Si, Ak, CA, CSP
NEM : 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972.Makassar.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **Rismawati**, NIM **105730536515** diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 130/Tahun 1440 H/ 2019 M. Tanggal 24 Agustus 2019 M sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Dzulhijjah 1440 H
24 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Saifur HR, SE., MM
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Agus Saifur HR, SE., MM
2. Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA, CSP
3. Abd Saifur HB, SE., M.Si., Ak., CA
4. Faidul Adzim, SE., M.Si



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972.Makassar.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rismawati
Stambuk : 105730536515
Progra Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Peranan Audit Manajemen Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba."

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan didepan Tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak di buatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 24 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan,


Rismawati

Diketahui Oleh:

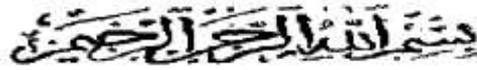
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi


Ismah Rasulong, SE.,MM
NBM 903078


Dr. Ismail Badollahi, SE.M.Si.Ak.CA.CSP
NBM 107 3428

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **“Peranan Audit Manajemen Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba”**.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak M. Jafar dan Ibu Niar yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,AK.,CA.,CSP, selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Edi Jusriadi, SE.,MM, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,AK.,CA.,CSP, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para

pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

2019

Makassar,

Rismawati



ABSTRAK

RISMAWATI, Tahun 2019, Peranan Audit Manajemen Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Edi Jusriadi dan Pembimbing II Ismail Badollahi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan audit manajemen dalam meningkatkan penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif, dengan metode analisis deskriptif, data yang di analisis adalah data wawancara dan data pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2014 sampai 2018 yang didapatkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan audit manajemen dalam meningkatkan penerimaan pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba sangat berperan penting dalam mengawasi sistem dan prosedur dalam penerimaan pendapatan daerah, dengan adanya audit manajemen dapat membantu pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai tujuan Badan Pendapatan Daerah, hal tersebut dilihat dengan adanya perbaikan Sistem Operasional yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba

Kata Kunci: Peranan Audit Manajemen, Pendapatan Daerah

ABSTRACT

RISMAWATI, 2019, *Role of Management Audit in Increasing Revenue Revenue of the Regional Government of Bulukumba Regency*, Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Advisor I Edi Jusriadi and Advisor II Ismail Badollahi.

This study aims to determine the role of management audit in increasing revenue of the Regional Government of Bulukumba Regency. The type of this research used in the research is qualitative research, with descriptive analysis methods, the data analyzed are interview data and regional income data of Bulukumba Regency in 2014 to 2018 obtained from the Regional Budget (APBD) of Bulukumba Regency.

The results of this study indicate that the role of management audit in increasing the revenue of the local government of Bulukumba Regency plays an important role in overseeing the system and procedures for regional revenue, with a management audit can help the Regional Revenue Agency of Bulukumba Regency to improve its performance in achieving the goals of Regional Revenue Agency , this was seen by the improvement of the Operational System that was carried out to increase the revenue of regional revenue of Bulukumba Regency,

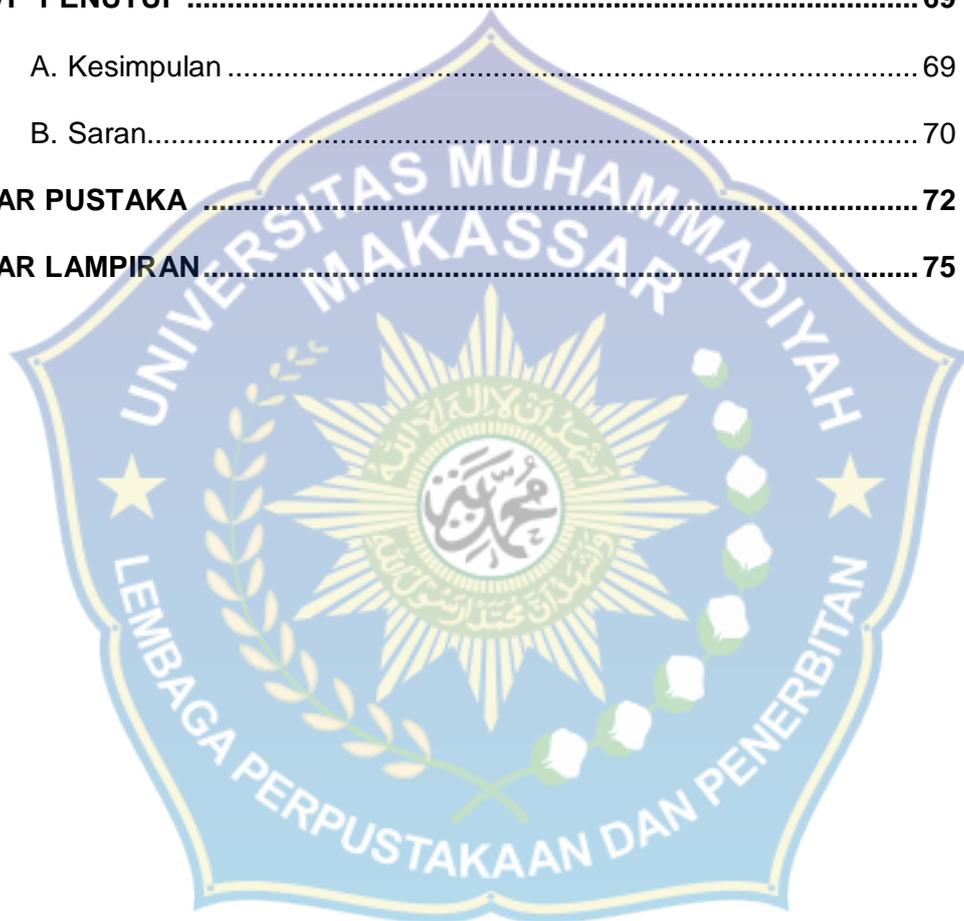
Keywords: *Role of Management Audit, Regional Revenue*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Audit Sektor Publik	6
B. Audit Manajemen.....	6
1. Pengertian Audit Manajemen	6
2. Tujuan dan Manfaat Audit Manajemen	8
3. Ruang Lingkup Audit Manajemen dan Sasaran Audit.....	9
4. Perbedaan Audit Manajemen dan Audit Keuangan.....	10
5. Kertas Kerja Audit.....	11

6. Prinsip Dasar Audit	12
7. Tahapan Audit Manajemen	13
C. Pengelola Keuangan Daerah	15
1. Prinsip Penyusunan Keuangan Daerah	17
D. Pendapatan Daerah	19
1. Pengertian Pendapatan Daerah	19
2. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	19
E. Penelitian Terdahulu	24
F. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi dan waktu Penelitian	32
C. Jenis Data	32
D. Metode Pengumpulan Data	33
E. Instrumen Penelitian	33
F. Metode Analisis	34
BAB IV GAMBARAN UMUM	35
A. Gambaran Objek Penelitian	35
1. Kabupaten Bulukumba	35
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba	37
B. Visi dan Misi Organisasi	38
C. Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i>	38
1. Struktur Organisasi	38
2. <i>Job Description</i>	40
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	46

A. Implementasi Audit Manajemen di Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.....	46
B. Hasil Penelitian	50
C. Peranan Audit Manajemen di Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba	59
D. Pembahasan.....	61
BAB VI PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR LAMPIRAN.....	75



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Hal
Tabel 2.1	Perbedaan Audit Manajemen dan Audit Keuangan	10
Tabel 2.2	Ringkasan Penelitian Terdahulu	28
Tabel 4.1	Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba	60



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Hal
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	31
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	39
Gambar 4.2	Sistem dan Prosedur Audit Manajemen	48
Gambar 4.3	Tingkat Pencapaian Pendapatan Daerah	61



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berlakunya otonomi daerah di Indonesia, di kenal pula istilah Desentralisasi Fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan pendelegasian wewenang pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab serta kebebasan dalam mengatur daerahnya sesuai dengan potensi dan aturan-aturan yang berlaku. Dalam menjalankan wewenang tersebut pemerintah daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber keuangannya sendiri yang didukung dengan adanya dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. (Erawati dan Rahmawati, 2016).

Pembangunan Negara sangat dipengaruhi oleh penerimaan pajak. Pajak di Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola secara langsung oleh daerah, baik itu kota, kabupaten maupun provinsi. Pada tahun 1997 pemerintah membuat kebijakan mengenai perubahan undang-undang pajak yaitu diberlakukannya

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Perubahan undang-undang pajak dilakukan karena pemungutannya memberatkan masyarakat dan tidak sesuai dengan perkembangan. (Tarigan, 2013)

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan. Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah harus lebih tertib, transparan, bertanggung jawab dan taat dengan aturan-aturan yang berlaku. Kemampuan pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah dan membiayai setiap pelaksanaan tugas-tugas untuk kesejahteraan masyarakat telah dituangkan dalam APBD langsung maupun tidak langsung. (Rondonuwu dkk, 2015)

Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan dan pendapatan daerah. APBD berisi daftar rincian penerimaan dan pengeluaran atau belanja daerah selama satu periode yang harus dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penyusunan APBD merupakan upaya agar belanja operasional pemerintah daerah lebih rendah dari pendapatan daerah pada periode tertentu. Rancangan penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam mewujudkan tujuan negara yang adil, makmur dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut negara memerlukan lembaga pengawasan serta pemeriksaan yang terbebas dari penyimpangan-penyimpangan yang berguna untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. (Mahsun dkk, 2015)

Pengendalian internal dalam suatu organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pengendalian internal merupakan faktor pendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggungjawab serta menjadi cerminan kinerja yang baik. Lemahnya pengendalian internal akan mengakibatkan kinerja dan tujuan tidak berjalan secara efektif dan efisien dalam lingkungan pemerintah daerah yang akan berdampak pada pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. (Mamuaja, 2016). Disisi lain, banyaknya pihak yang berada dalam lingkungan pemerintah daerah yang belum siap dengan pelaksanaan otonomi daerah, terutama dalam masalah etika dan moral dari pihak daerah tersebut yang masih sangat rendah. Selain itu, dalam rangka mewujudkan *Good Governance* yang menjadi pertanyaan besar adalah peran dan fungsi audit internal yang berada dalam lingkungan pengawasan pemerintahan atau Inspektorat daerah dalam upaya untuk mengawal serta mengawasi beberapa kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) atau Inspektorat daerah merupakan suatu lembaga pengawasan yang ada dilingkungan pemerintah daerah yang memegang kendali yang sangat besar dan berpengaruh dalam kemajuan serta keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut.

Hal inilah yang menjadi pusat pertimbangan inspektorat daerah dan pihak yang memegang fungsi dalam pengawasan pemerintah daerah. Untuk mencapai

tujuan dan harapan tersebut, seluruh kegiatan audit harus sejalan dengan berbagai fungsi-fungsi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti fungsi aktivitas dan fungsi program yang dijalankan.

Wilayah Sulawesi Selatan yang berpusat pada BAPENDA sebagai Badan Pendapatan Daerah, dari banyaknya daerah yang ada di Sulawesi Selatan yang menjadi fokus peneliti yaitu Kabupaten Bulukumba pada kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Berkaitan dengan tugas dasar dan tujuan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang dituangkan dalam visi dan misi instansi, terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah antara lain memaksimalkan peningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan pendapatan daerah yang bersih, tertib, inovatif, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk merumuskan ke dalam penelitian yang berjudul **“Peranan Audit Manajemen Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : “Bagaimana peranan audit manajemen dalam meningkatkan penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai penulis adalah: Untuk mengetahui peranan audit manajemen dalam meningkatkan penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan yang disiplin ilmu akuntansi terutama ilmu audit yang terkait dengan independensi, kompetensi dan etika profesi serta kualitas audit. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, terutama Inspektorat Daerah dalam mengawasi keuangan daerah serta dalam mengelola sumber daya manusianya, dan berbagai pihak yang terkait didalamnya.

3. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakaun untuk melakukan reformasi dan restrukturisasi terhadap Peraturan Daerah terkait dengan pendapatan daerah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Audit Sektor Publik

Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut. (Arifah, 2012).

Secara umum audit yang dilakukan pada organisasi sektor publik ada tiga yaitu:

1. Audit Keuangan adalah audit yang dilakukan untuk menjadikan bahwa sistem akuntansi telah berjalan dengan tepat dan semua transaksi dicatat dengan benar.
2. Audit Kepatuhan adalah yang melakukan pemeriksaan bahwa pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan untuk pelayanan telah di setujui dan sesuai undang-undang.
3. Audit Manajemen (Audit Operasional) yang merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya.

B. Audit Manajemen

1. Pengertian Audit Manajemen

Sebelum kita terlalu jauh membahas audit manajemen, yang perlu kita ketahui apa audit manajemen itu. Hal ini dimaksud agar lebih menjelaskan

audit manajemen secara umum. Berikut adalah pengertian audit manajemen yang dikemukakan oleh para ahli.

Menurut Sukrisno Agoes (2017) dalam bukunya *Auditing menjelakan* bahwa :

“Audit manajemen adalah suatu pemeriksaan yang meliputi seluruh kegiatan operasi perusahaan, baik itu mengenai kebijakan akuntansi dan kegiatan operasional suatu perusahaan untuk menilai apakah kegiatan operasi tersebut berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis.”
Sedangkan menurut IBK Bayangkara (2017) dalam bukunya audit

manajemen mengemukakan bahwa:

“Audit manajemen adalah penilaian terhadap efisien dan efektivitas operasi perusahaan. Manajemen meliputi semua jenis operasi atau kegiatan internal perusahaan untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Audit manajemen dirancang secara sistematis untuk menilai seluruh kegiatan operasional perusahaan, terutama sumber daya yang dimiliki perusahaan apakah sudah digunakan secara efisien dan efektif, dan tidak melanggar ketentuan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa audit manajemen adalah suatu pemeriksaan untuk memeriksa dan menilai seluruh kegiatan internal perusahaan yang akan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi, audit manajemen akan memeriksa apakah kegiatan operasi perusahaan dan pengelolaan sumber daya sudah berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis, serta tidak melanggar aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

2. Tujuan dan Manfaat Audit Manajemen

Sukrisno Agoes (2017) menyebutkan tiga tujuan utama audit manajemen yaitu :

- 1) Untuk membandingkan laporan keuangan perusahaan pada periode yang sedang berjalan dengan periode yang lalu, serta realisasinya dan menghitung rasio pada periode yang sedang berjalan dengan periode yang lalu.
- 2) Untuk memastikan keamanan aset dan data keuangan serta pemborosan anggaran dengan adanya sistem pengendalian manajemen dan sistem pengendalian internal dalam perusahaan.
- 3) Untuk menilai seberapa besar efektivitas system pengendalian manajemen dan system pengendalian internal dalam perusahaan dengan cara melakukan pemeriksaan bukti-bukti pembukuan dan pencatatan mengenai keuangansesuai dengan aturan dan kebijakan yang telah diterapkan oleh pihak manajemen perusahaan.

Vika (2015) Audit manajemen dapat memberikan manfaat, yaitu :

- a. Mengidentifikasi tujuan dari prosedur organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Sebagai pengukur pencapaian tujuan organisasi dan menilai kinerja manajemen dalam menjalankan tugasnya.
- c. Menilai secara independen dan objektif mengenai kegiatan organisasi.
- d. Mencari letak permasalahan dan yang menjadi penyebab dari masalah tersebut.

- e. Mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pengendalian manajemen.
- f. Mendorong pendapatan dan menekan biaya serta yang menjadi hambatan dalam organisasi.

3. Ruang Lingkup Audit Manajemen dan Sasaran Audit

Ruang lingkup audit manajemen meliputi aspek kegiatan yang berkaitan dengan manajemen serta mencakup seluruh atau sebagian dari program/aktivitas yang dijalankan. Periode dalam menjalankan audit bervariasi sesuai dengan seberapa lama waktu yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan (Elvira, 2011).

Sedangkan yang menjadi sasaran audit manajemen yaitu seluruh atau sebagian dalam program/aktivitas dalam perusahaan yang memerlukan perbaikan dan perlu ditingkatkan, baik dari segi ekonomis, efisiensi dan efektivitas (Elvira, 2011).

Terdapat tiga elemen pokok yang menjadi sasaran audit, yaitu :

a. Kriteria (*Criteria*)

Kriteria merupakan suatu standar yang dijadikan pedoman setiap individu/kelompok dalam melakukan setiap aktivitas.

b. Penyebab (*Cause*)

Penyebab merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu/kelompok dalam perusahaan. Penyebab ini dapat bersifat positif atau negatif apabila program/aktivitas yang dijalankan menghasilkan tingkat efektivitas dan efisiensi lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan.

c. Akibat (*Effect*)

Akibat merupakan perbandingan antara penyebab dan kriteria yang memiliki hubungan langsung dengan penyebab. Akibat positif menunjukkan program/aktivitas telah berjalan dengan tingkat pencapaian yang lebih besar dari kriteria yang ditetapkan. Sedangkan akibat negatif menunjukkan bahwa program/aktivitas berjalan dengan tingkat pencapaian yang lebih rendah dari kriteria yang ditetapkan.

4. Perbedaan Audit Manajemen dan Audit Keuangan

Audit manajemen dirancang untuk menemukan penyebab dari kelemahan kelemahan yang terjadi pada pengelolaan program/aktivitas perusahaan, menganalisis akibat yang ditimbulkan oleh kelemahan tersebut dan menentukan tindakan perbaikan (rekomendasi) yang berkaitan dengan kelemahan tersebut agar dicapai perbaikan di masa yang akan datang. Berbeda dengan audit keuangan yang menekankan auditnya pada data-data transaksi, proses pencatatan, dan laporan akuntansi yang dibuat oleh perusahaan. (IBK Bayangkara, 2017).

Menurut Agoes (2018) ada beberapa perbedaan antara audit manajemen dan audit keuangan, yaitu :

Tabel 2.1

Perbedaan Audit Manajemen dengan Audit Keuangan

No	Audit Manajemen	Audit Keuangan
1	Bisa dilakukan oleh internal auditor atau management consultant.	Harus dipimpin oleh seorang accountant dari sebuah kantor akuntan publik.

2	Pada akhir pemeriksaannya auditor memberikan laporan kepada manajemen berupa temuan-temuan audit mengenai efektivitas sistem pengendalian manajemen, apakah kegiatan operasi perusahaan sudah dijalankan secara efisien, ekonomis, dan efektif, beserta saran-saran untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan selama pelaksanaan manajemen audit.	Pada akhir pemeriksaannya, auditor harus memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun manajemen.
3	Biasanya dilakukan jika manajemen merasakan adanya kebutuhan	Dilakukan secara rutin
4	Ikatan Akuntan Indonesia belum menyusun standar pemeriksaan untuk audit manajemen, namun BPKP dan BPK sudah memiliki pedoman manajemen audit.	Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
5	Kriteria dalam audit manajemen bisa berupa kebijakan yang ditentukan manajemen, peraturan pemerintah, peraturan asosiasi dan lain-lain.	Kriteria dalam audit keuangan sudah jelas, yaitu ETAP/PSAK/IFRS.

5. Kertas Kerja Audit (KKA)

Kertas Kerja Audit (KKA) merupakan catatan-catatan yang dibuat berdasarkan data-data yang dikumpulkan auditor saat melakukan audit.

Kertas Kerja Audit (KKA) harus menggambarkan langkah-langkah yang ditempuh serta pengujian-pengujian yang dilakukan dan informasi apa saja yang diperoleh untuk memberikan kesimpulan dari hasil audit yang dilakukan. (IBK Bayangkara, 2017)

Auditor wajib membuat Kertas Kerja Audit (KKA) dalam menjalankan prosedur dan tujuan dari audit. Adapun manfaat utama dari Kertas Kerja Audit (KKA), yaitu:

- a. KKA digunakan sebagai dasar penyusunan laporan hasil audit
- b. KKA dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas audit selanjutnya,
- c. Menjadi bukti dari laporan hasil audit,
- d. Sebagai alat bagi atasan untuk menilai dan mengawasi pekerjaan para pelaksana audit.

6. Prinsip Dasar Audit Manajemen

Auditor harus memperhatikan prinsip dasar untuk mencapai tujuan yang baik dalam audit manajemen, prinsip dasar tersebut terdiri atas tujuh (IBK Bayangkara, 2017) yaitu :

1. Audit dititikberatkan pada objek audit yang mempunyai peluang untuk diperbaiki,
2. Prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit,
3. Pengungkapan dalam laporan tentang adanya temuan-temuan yang bersifat positif,

4. Identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi,
5. Penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab,
6. Pelanggaran hukum,
7. Penyelidikan dan pencegahan kecurangan

7. Tahapan Audit Manajemen

Menurut IBK Bayangkara (2017) dalam melakukan audit manajemen ada beberapa tahapan. Secara umum tahapan-tahapan tersebut ada lima, yaitu :

a. Audit Pendahuluan

Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai objek yang diaudit. Pada audit ini pula dilakukan untuk melihat berbagai kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan aktivitas audit. Selain itu, pada audit pendahuluan dilakukan analisis untuk mencari kelemahan-kelemahan pada perusahaan yang menjadi objek audit.

b. Review dan Pengendalian Manajemen

Tahapan ini dilakukan review dan melakukan pengujian terhadap pengendalian manajemen dalam perusahaan yang di audit. Hal ini bertujuan untuk melihat seberapa efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung perusahaan untuk mencapai tujuan. Dari hasil pengujian tersebut, auditor akan lebih memahami pengendalian manajemen dalam perusahaan yang akan memudahkan dalam

mengidentifikasi kelemahan dalam aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan.

c. Audit Terinci

Auditor melakukan pengumpulan bukti yang berkompeten yang mendukung tujuan dari audit dengan melakukan pengembangan temuan serta mencari keterkaitan antara temuan yang satu dengan temuan yang lain yang memiliki keterkaitan dalam permasalahan tujuan audit. Temuan-temuan ini kemudian disajikan dalam kertas kerja audit (KKA) yang dijadikan sebagai bukti untuk mendukung kesimpulan audit dan mendukung rekomendasi yang diberikan kepada objek audit

d. Pelaporan

★ Tahap pelaporan ini adalah tahap untuk mengkomunikasikan hasil audit yang merupakan rekomendasi yang diberikan kepada pihak yang memiliki kepentingan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk meyakinkan pihak manajemen sebagai objek audit mengenai kebenaran hasil audit serta mendorong pihak manajemen untuk melakukan perbaikan mengenai kelemahan-kelemahan yang ditemukan. Laporan yang menyajikan temuan-temuan yang mendukung hasil audit dan rekomendasi dilaporkan dalam laporan komprehensif. Rekomendasi yang diberikan harus menggunakan bahasa operasional dan mudah dipahami oleh pihak manajemen agar menarik untuk ditindaklanjuti.

e. Tindak Lanjut

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam audit manajemen, tindak lanjut ini bertujuan untuk memberikan dorongan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan perbaikan mengenai kelemahan-kelemahan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Dalam hal ini, auditor tidak memiliki hak untuk memaksa pihak manajemen untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan harus merupakan hasil diskusi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan mengenai perbaikan tersebut karena jika tidak disepakati oleh objek audit akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan tindak lanjutnya.

C. Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan/aktivitas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan daerah yang merupakan semua yang menjadi hak dan kewajiban daerah, baik itu dapat dinilai dengan uang atau barang yang menjadi milik daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. (South dkk, 2016).

Hak dan Kewajiban pemerintah tersebut diwujudkan dalam rencana kerja pemerintah daerah yang kemudian dijabarkan dalam APBD yang dikelola dalam

system pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel serta taat pada aturan-aturan yang berlaku. (Halim dkk, 2010)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 menyatakan tujuan dari pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

- a. Tanggung Jawab (*Accountability*)
- b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan
- c. Kejujuran
- d. Hasil gunadan daya guna
- e. Pengendalian

Pengertian keuangan daerah selalu terkait dengan pengertian APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Salah satu asas penting dalam menetapkan prioritas anggaran belanja yang dijabarkan dalam APBD adalah bahwa penentuan anggaran disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Secara khusus, penganggaran pengeluaran harus didukung oleh adanya kepastian sumber pendanaan yang cukup dan memiliki landasan hukum yang kuat (Halim dkk, 2010)

Keterkaitan antara keuangan daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bukti adanya hubungan antara dana pusat

dan dana daerah yang dikenal dengan istilah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

1. Prinsip Penyusunan Keuangan Daerah.

Berdasarkan dengan Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyusunan Keuangan Daerah APBD, penyusunan Keuangan Daerah berpedoman pada prinsip-prinsip anggaran sebagai berikut :

1) Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat, hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui haknya dalam pelaksanaan APBD.

2) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Penyusunan APBD harus memuat informasi yang lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat yang meliputi tujuan dan sumber yang sesuai dengan setiap tujuan atau jenis pengeluaran dan perbandingan antara anggaran dengan hasil dan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan yang telah dianggarkan. Oleh karena itu, setiap penggunaan anggaran harus bertanggungjawab atas penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3) Disiplin Anggaran

Sesuai prinsip dalam disiplin anggaran yang menjadi pertimbangan yaitu

(a) Pendapatan yang diberikan merupakan estimasi yang terukur untuk

semua sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas atas pengeluaran daerah, (b) penganggaran pengeluaran harus didukung dengan penerimaan kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan dalam pelaksanaan kegiatan yang belum tersedia dan tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/ Perubahan APBD, (c) semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

4) Keadilan Anggaran

Pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya harus sesuai dengan kemampuan masyarakat dalam membayar, dalam arti masyarakat yang memiliki pendapatan yang rendah diberikan beban yang sama, sedangkan masyarakat yang memiliki pendapatan yang tinggi diberikan beban yang lebih tinggi pula. Pemerintah harus melakukan penggantian mengenai tarif sesuai dengan pertimbangan untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Selain itu dalam mengalokasikan belanja daerah, harus mempertimbangkan keadilan dan pemantauan agar dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya pelepasan pelayanan.

5) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam meningkatkan pelayanan masyarakat untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dalam mengendalikan

anggaran-anggara tersebut ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu (1) Penetapan tujuan dan sasaran yang jelas, hasil serta manfaat, dan indikator yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan, (2) Penetapan kegiatan dan menghitung beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional,

6) Taat azas

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan bentuk kebijakan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan tidak boleh dilanggar oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

D. Pendapatan Daerah

1. Pengertian Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dari periode tahun yang bersangkutan (Wulandari, 2018).

Transaksi penerimaan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (Mahsun dkk, 2015)

2. Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan, bahwa sumber pendapatan atau penerimaan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Aji, 2015), yaitu :

a) Pajak daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah yang berguna untuk kemakmuran rakyat.

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah atau pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah daerah, salah satunya adalah membiayai pembangunan di daerah, dimana setiap orang wajib membayar retribusi sesuai dengan kewajiban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas jasa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat (Putra dkk, 2014).

c) Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang meliputi bagian

dari laba atas keterkaitan modal pada perusahaan Negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta

d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Munurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

b. Dana Perimbangan

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisiensi dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan melakukan pertimbangan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, serta besarnya pendanaan dalam penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari Penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan disebut juga transfer. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah (Wulandari, 2018).

Dana perimbangan dipisahkan menjadi tiga jenis, yaitu :

a) Dana bagi hasil

Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas :

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
3. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari :

1. Kehutanan,
2. Pertambangan Umum,
3. Perikanan,
4. Pertambangan Minyak Bumi,
5. Pertambangan Gas Bumi,
6. Pertambangan Panas Bumi

b) Dana alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dana alokasi umum merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Proporsi Dana alokasi umum antara daerah provinsi dan kabupaten atau kota ditetapkan

berdasarkan imbangn kewenangan antara provinsi dan kabupaten atau kota.

c) Dana alokasi khusus

Dana alokasi khusus adalah dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Pasal 39 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam APBN.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-Lain pendapatan yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas pendanaan hibah dan pendapatan dana darurat. Hibah atau bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan lembaga atau organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat atau perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka menanggulangi korban atau kerusakan akibat bencana alam dan krisis solvabilitas (Wulandari, 2018).

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, hasil dari penelitian tersebut dapat kita jadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi terkait dengan penelitian yang dilakukan, sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Arifah (2012) ,dengan judul “Penerapan Audit Kinerja (Audit Operasional) Pada Sektor Swasta Dan Pemerintah”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan audit operasional pada sektor swasta dan pemerintah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik organisasi pemerintah berbeda dengan organisasi bisnis, hal ini berimplikasi pula pada praktik akuntansi yang berlaku di kedua organisasi tersebut termasuk auditnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Riyanto dan Hadi (2016), dengan judul “Keefektifan Audit Internal Pemerintah Daerah”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh antara sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap keefektifan audit internal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dan dukungan manajemen berpengaruh secara positif terhadap keefektifan audit internal.

Penelitian yang dilakukan oleh Prawiranegara (2017), dengan judul “Analisis Peran Audit Operasional Dalam Meningkatkan Efektivitas Intern Penjualan Pada PD. ACB Banjarasari”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran audit operasional dalam meningkatkan efektivitas intern penjualan pada PD. ACB.

Hasil dari penelitian ini adalah audit operasional pada PD. ACB Banjarasari telah dilaksanakan dengan cukup memadai serta berjalan dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dilihat dari adanya tahapan-tahapan audit yang dilaksanakan sesuai secara lengkap dengan ketentuan yang berlaku sehingga pelaksanaan audit tersebut berperan dalam meningkatkan efektivitas intern penjualan pada PD.ACB Banjarasari.

Penelitian yang dilakukan oleh Sunanto (2014), dengan judul “Peranan Audit Operasional Dalam Meningkatkan Pengeluaran Kas Di PDAM Tirta Randik Kabupaten Banyuasin”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan audit operasional dalam meningkatkan pengeluaran kas di PDAM Tirta Randik Kabupaten Banyuasin. Hasil dari penelitian ini adalah peranan audit operasional dalam meningkatkan efektivitas pengeluaran kas di PDAM Tirta Randik dinilai sudah cukup berpengaruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Jesthy dkk (2017) dengan judul “Analisis Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan Kinerja Pada Badan Usaha Milik Daerah”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan prosedur audit kinerja pada Badan Usaha Milik Daerah dan penyebab tidak adanya laporan dari suatu proyek atau kegiatan yang dilaksanakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur audit kinerja pada badan usaha milik daerah dilakukan berdasarkan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang ditetapkan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008, penyebab tidak adanya laporan atau data adalah kurangnya komitmen pegawai sebagai pemilik untuk

membangun tatakelola perusahaan yang baik dan tidak adanya Dewan Pengawas.

Penelitian yang dilakukan oleh South dkk (2016) dengan judul “Pengukuran Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan selama tahun anggaran 2011-2014 rata-rata diatas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan daerah tersebut sangat fektif. Sedangkan secara keseluruhan rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan tahun anggaran 2011-2014 kurang efisien, dikarenakan pengeluaran daerah yang masih tinggi jika dibandingkan dengan total penerimaan pendapatan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra dkk (2014), dengan judul “Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kotribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas, laju pertumbuhan masing-masing jenis retribusi daerah Kota Blitar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Blitar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah berdasarkan jenis-jenisnya selama periode 2008-2012 secara keseluruhan sudah efektif, tetapi kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah selama periode tersebut masih

kurang, serta program intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan pemerintah belum optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Kesek (2013), dengan judul “Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerimaan pajak parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado tahun 2009-2012 dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan pajak parkir terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado tahun 2009-2012. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap tahun target dan realisasi penerimaan pajak parkir meningkat dengan tingkat efektivitas dan besarnya kontribusi yang bervariasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Lamia dkk (2015) dengan judul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan dan kontribusi pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2010-2014. Hasil dari penelitian ini menunjukkan keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan pada tahun 2010-2014 sangat efektif. Penerimaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan pada tahun 2010-2014 memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian yang dilakukan Rahmawati dan Rusli (2014), dengan judul “Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* pada Kab Luwu”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Audit Internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya audit internal akan mendorong tercapainya penerapan *Good Corporate Governance* di lingkup Inspektorat sehingga nanti secara garis besar nantinya akan mendorong tatakelola keuangan dilingkup pemerintah kabupaten akan berjalan dengan baik secara efektif dan efisien.

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Arifah (2012)	Penerapan Audit Kinerja (Audit Operasional) Pada Sektor Swasta Dan Pemerintah	Kualitatif	Audit manajemen dibagi menjadi empat jenis audit, audit kinerja merupakan audit manajemen
2	Riyanto dan Hadi (2016)	Keefektifan Audit Internal Pemerintah Daerah	Regresi Berganda	Sistem pengendalian intern, dukungan manajemen berpengaruh positif terhadap keefektifan audit internal.
3	Prawiranegara (2017)	Analisis Peran Audit Operasional Dalam Meningkatkan Efektivitas Intern Penjualan Pada DB ABC	Deskriptif	Audit operasional yang memadai berperan meningkatkan efektivitas pengendalian internal penjualan pada DB ABC
4	Sunanto (2014)	Peranan Audit Operasional Dalam Meningkatkan Pengeluaran Kas Di PDAM Tirta Randik	Kuantitatif	Peranan audit operasional dalam meningkatkan efektivitas dinilai sudah cukup

		Kabupaten Banyuasin		berpengaruh
5	Jesthy dkk (2017)	Analisis Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan Kinerja Pada Badan Usaha Milik Daerah	Deskriptif	Pelaksanaan prosedur pemeriksaan kinerja pada Badan Usaha Milik Daerah dilakukan berdasarkan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang ditetapkan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008
6	South dkk (2016)	Pengukuran Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa	Deskriptif	Pengelolaan keuangan pada PDKPA Kabupaten Minahasa Selatan sangat efektif yang dilihat dari tahun anggaran 2011-2014 yang mencapai 100% tetapi dalam pengelolaan keuangan daerah masih kurang efisien
7	Putra dkk (2014)	Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar)	Deskriptif	Pada periode 2008-2012 menunjukkan bahwa dari keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah sudah efektif.
8	Kesek (2013)	Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado	Deskriptif-Kualitatif	Pada tahun anggaran 2009-2012 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak parkir mengalami peningkatan setiap tahunnya.
9	Lamia (2015)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi	Deskriptif Kualitatif	Pajak reklame, pajak restoran dan pajak

		Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Pada PAD Kabupaten Minahasa		penerangan jalan secara keseluruhan mengalami peningkatan dan sudah efektif
10	Rahmawati (2014)	Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Penerapan Good Corporate Governance Luwu	Kuantitatif	Audit internal akan mendorong tercapainya penerapan Good Governance dilingkup Inspektorat sehingga nanti secara garis besar nantinya akan mendorong tatakelola keuangan dilingkup pemerintah kabupaten .

F. Kerangka Pikir

Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) atau Inspektorat daerah merupakan suatu lembaga pengawasan yang ada dalam lingkungan daerah yang memegang kendali yang sangat besar dan berpengaruh dalam kemajuan serta keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hal inilah yang menjadi pertimbangan inspektorat daerah dan pihak-pihak yang memegang fungsi dalam pengawasan daerah. Untuk mencapai tujuan dan harapan tersebut, maka kegiatan audit yang dilakukan harus sejalan dengan berbagai fungsi-fungsi dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti fungsi aktivitas dan fungsi program dan lainnya.

Penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan manajemen audit dalam mengawasi sistem keuangan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba

memberikan wewenang kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) untuk mengelola pendapatan daerah secara profesional dan transparan, dalam rangka mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah. Dengan dilakukannya pengelolaan pendapatan daerah secara optimal akan berdampak pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Deskriptif-kualitatif merupakan metode penelitian yang menggambarkan kondisi dari objek penelitian. Menurut Sugiyono (2014) penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti objek yang alamiah yang dikumpulkan dari data yang bentuk kata-kata, kalimat, dokumen, maupun arsip yang sesuai dengan judul penelitian. Penelitian ini menggunakan Deskriptif-kualitatif karena penelitian ini berusaha menggambarkan keadaan yang sebenarnya, hasilnya diharapkan mampu memberikan gambaran secara obyektif dari objek yang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bulukumba yang beralamat jalan Jendral Sudirman No. 05 Bulukumba. Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2019.

C. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

- 1) Data Primer, yaitu data yang berisikan informasi yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil dokumentasi berupa informasi atau dokumen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung di lapangan terkait dengan penelitian.
2. Wawancara, yaitu proses tanya jawab yang dilakukan peneliti dengan pimpinan atau pegawai yang terkait dengan masalah penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu melakukan penelitian terhadap struktur organisasi kantor dan laporan keuangan operasional.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa alat, yaitu :

1. Perekam suara,
2. Buku catatan,
3. Alat tulis,
4. Daftar pertanyaan wawancara

F. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, dimana peneliti menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat dan data angka berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terkait dengan masalah yang diajukan.

Metode analisis tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Kesek (2013) bahwa analisis deskriptif yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Metode analisis tersebut sudah pernah digunakan pada penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Suoth tahun 2016 dan penelitian yang dilakukan oleh Rondonuwu tahun 2015.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif karena dalam penelitian ini peneliti menggambarkan mengenai bagaimana peranan audit manajemen dalam meningkatkan penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan mengevaluasi sistem dan prosedur apakah dapat berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dalam penelitian ini. Dari hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan terkait masalah yang diajukan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan , Indonesia. Ibu kota Kabupaten Bulukumba terletak di kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas 1.154,67 km² dan berpenduduk sebanyak 394.757 jiwa. Kabupaten Bulukumba memiliki 10 kecamatan, 24 kelurahan, serta 123 desa.

Secara kewilayahan, kabupaten Bulukumba terletak pada kondisi empat dimensi, yaitu dataran tinggi di kaki Gunung Bawakaraeng-Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terkenal dengan industri perahu yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Pemerintah Daerah.

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 05°20° – 05°40° LS dan 119°58° - 120°28° BT. Dengan batas wilayah:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Sinjai
2. Sebelah Selatan : Laut Flores
3. Sebelah Timur : Teluk Bone
4. Sebelah Barat : Kabupaten Bantaeng

Awal terbentuknya, kota Bulukumba hanya terdiri atas tujuh kecamatan (Ujungbulu, Gangking, Bulukumpa, Bontobahari, Bontotiro, Kajang, Herlang), tetapi beberapa kecamatan kemudian dimekarkan dan kini “butta panrita lopi” sudah terdiri atas 10 kecamatan.

Ke 10 kecamatan tersebut adalah:

- 1) Kecamatan Ujung Bulu (Ibukota Kabupaten)
- 2) Kecamatan Gantarang
- 3) Kecamatan Kindang
- 4) Kecamatan Rilau Ale
- 5) Kecamatan Bulukumpa
- 6) Kecamatan Ujung Loe
- 7) Kecamatan Bonto Bahari
- 8) Kecamatan Bonto Tiro
- 9) Kecamatan Kajang
- 10) Kecamatan Herlang

Kecamatan yang terdiri dari 10 tersebut, tujuh di antaranya merupakan daerah pesisir sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang.

Tiga kecamatan lainnya tergolong sentra pengembangan pertanian dan perkebunan, yaitu Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale dan Kecamatan Bulukumpa.

2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba merupakan unsur pelaksana yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba resmi berdiri menjadi Badan pada tahun 2016, Bapenda yang sebelumnya adalah bagian dari Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah, namun dipisah dikarenakan semakin meningkatnya usaha pembangunan daerah yang merupakan salah satu tugas pokok pemerintah daerah untuk menuju ke arah otonomi yang dinamis, nyata, dan bertanggungjawab, maka perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan daerah maka dilakukan pemekaran menjadi dua SKPD yang menjalankan fungsinya masing-masing untuk membangun daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dan Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba

B. Visi dan Misi Organisasi

1. Visi

Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. “Maksimalnya peningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan pendapatan daerah yang Bersih, Tertib, Transparan, Akuntabel dan Inovatif”.

2. Misi

Berdasarkan Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba kedepan, ditetapkan misi sebagai berikut :

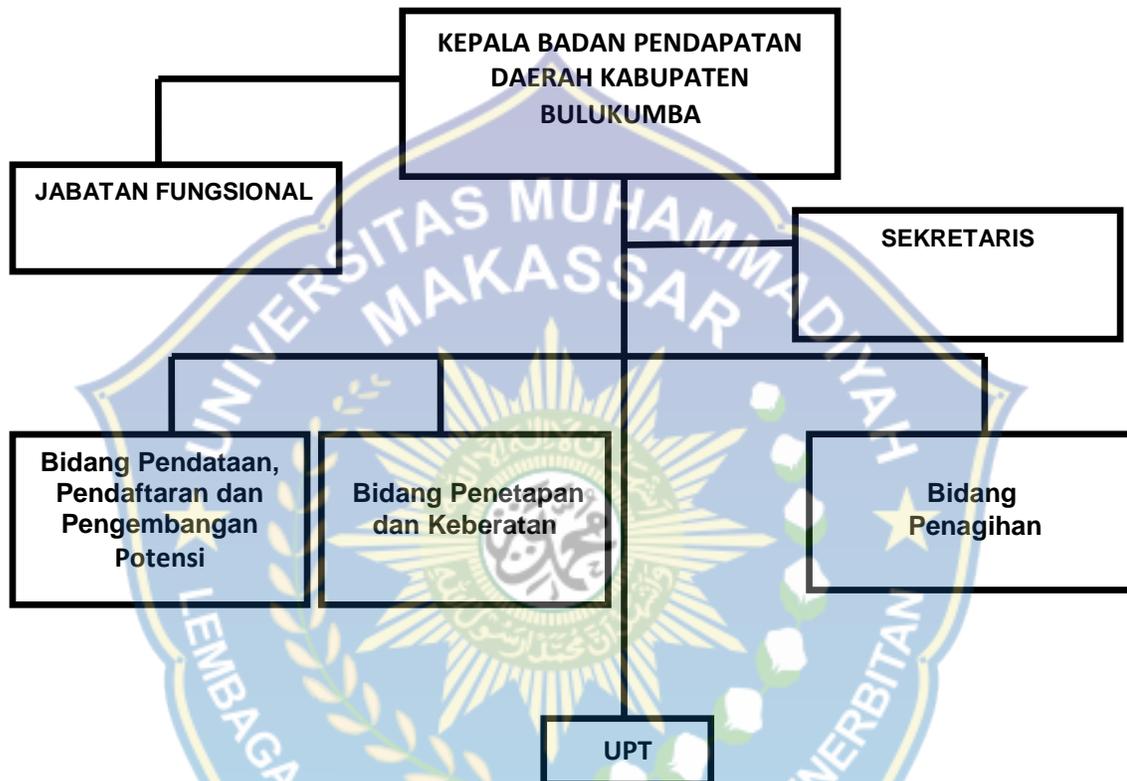
- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 13% pertahun total pendapatan daerah sekitar 10% pertahun.
- b. Meningkatkan Kapasitas, Efektivitas dan Efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak.
- c. Mewujudkan aparatur pengelola pendapatan daerah yang cakap, handal, jujur, bertanggung jawab dan professional dalam kemampuan teknis maupun manajemen.
- d. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang tranparan dan akuntabel.
- e. Peningkatan koordinasi dan pengendalian.

C. Struktur Organisasi dan *Job Description*

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukkan pekerjaan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap anggota organisasi pada setiap pekerjaan. Dalam pencapain

tujuan dan sasaran suatu organisasi maka struktur organisasi sangat penting karena struktur organisasi merupakan salah satu syarat dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien.



Gambar 4.1

Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba

2. *Job Description*

1. Kepala Badan

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah,
- b. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan agar tercipta sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah dalam lingkup kerja dan kewenangan Badan Pendapatan Daerah,
- c. Menyelenggarakan urusan Badan Pendapatan Daerah,
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah,
- e. Mengendalikan pengelolaan keuangan Badan Pendapatan Daerah,
- f. Menyelenggarakan urusan umum Badan Pendapatan Daerah.
- g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah.
- h. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi program dan kegiatan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka terciptanya keselarasan program kegiatan antar tingkatan pemerintahan dalam lingkup kerja dan kewenangan Badan Pendapatan Daerah,
- i. Mendistribusikan tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kepada bawahan,
- j. Memantau dan mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan,
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas,
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan,

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

- a. Mengkoordinasikan dan penyusunan program serta dalam kegiatan kesekretariatan,
- b. Melaksanakan pelayanan kesekretariatan,
- c. Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kesekretariatan,
- d. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan penegelolaan keuangan dan perlengkapan,
- e. Merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan dan melakukan mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian, keuangan dan perlengkapan,
- f. Menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- g. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan unit kerja dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah,
- h. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan pengelolaan keuangan dan asset, serta pelaksanaan urusan perlengkapan,
- i. Melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan, pelaporan dan aset,

- j. Menilai prestasi kerja para kepala sub bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir,
 - k. Menginventarisir permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya,
 - l. Memeriksa bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP),
 - m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas,
 - n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan,
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Penagihan
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan,
 - b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan,
 - c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan,
 - d. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan,
 - e. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penagihan,
 - f. Melaksanakan penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak daerah lainnya,
 - g. Menyusun laporan realisasi tunggakan PBB, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB dan pajak daerah lainnya,

- h. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA),
 - i. Menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan,
 - j. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM),
 - k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan,
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Penetapan Dan Keberatan
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan dibidang penetapan dan keberatan,
 - b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan,
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan,
 - d. Memeriksa bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penetapan, keberatan, pembukuan dan pelaporan,
 - e. Memeriksa bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program penetapan dan keberatan,
 - f. Melaksanakan penghitungan penetapan dan keberatan,
 - g. Melaksanakan proses penghitungan penetapan, keberatan, pembukuan dan pelaporan,

- h. Melaksanakan pencetakan dan penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya,
 - i. Melaksanakan porporasi benda berharga BPHTB dan Pajak daerah lainnya,
 - j. Merumuskan penyusunan daftar rekapitulasi SKPD dan surat ketetapan lainnya yang telah diterbitkan,
 - k. Mendistribusikan SSPD, BPHTB, dan SKPD kepada wajib pajak daerah lainnya,
 - l. Melaksanakan pemungutan BPHTB dan pajak daerah lainnya,
 - m. Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA),
 - n. Merumuskan penyusunan standar pelayanan public (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP),
 - o. Merumuskan penyusunan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan standar pelayanan minimal (SPM),
 - p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas,
 - q. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada atasan,
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengembangan Potensi
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan dibidang pendataan, pendaftaran dan pengembangan potensi,

- b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan,
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan,
- d. Memeriksa bahan perumusan dan pendataan, pendaftaran dan pengembangan potensi, pengelolaan data dan pelayanan umum dan pengembangan potensi,
- e. Melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen pendataan, pendaftaran, dan pengembangan potensi, pengelolaan data dan pelayanan umum dan pengembangan potensi,
- f. Melaksanakan pencetakan dan penerbitan data SPPT dan/atau SKPD pajak bumi dan bangunan (PBB),
- g. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Anggaran (DPPA),
- h. Melaporkan hasil penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Anggaran (DPPA),
- i. Menyusun standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM),
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas,
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan,
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Audit Manajemen di Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba

Implementasi audit manajemen di Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba merupakan upaya pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba untuk menjalankan sistem pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, pelaksanaan audit manajemen yang dinilai mampu untuk memberikan manfaat yang lebih mengenai peningkatan kinerja yang dilakukan agar mampu menjalankan fungsi dan tugas yang telah diberikan oleh pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi dalam mengoptimalkan pendapatan daerah untuk kepentingan masyarakat luas terutama masalah pembangunan yang ada di Kabupaten Bulukumba.

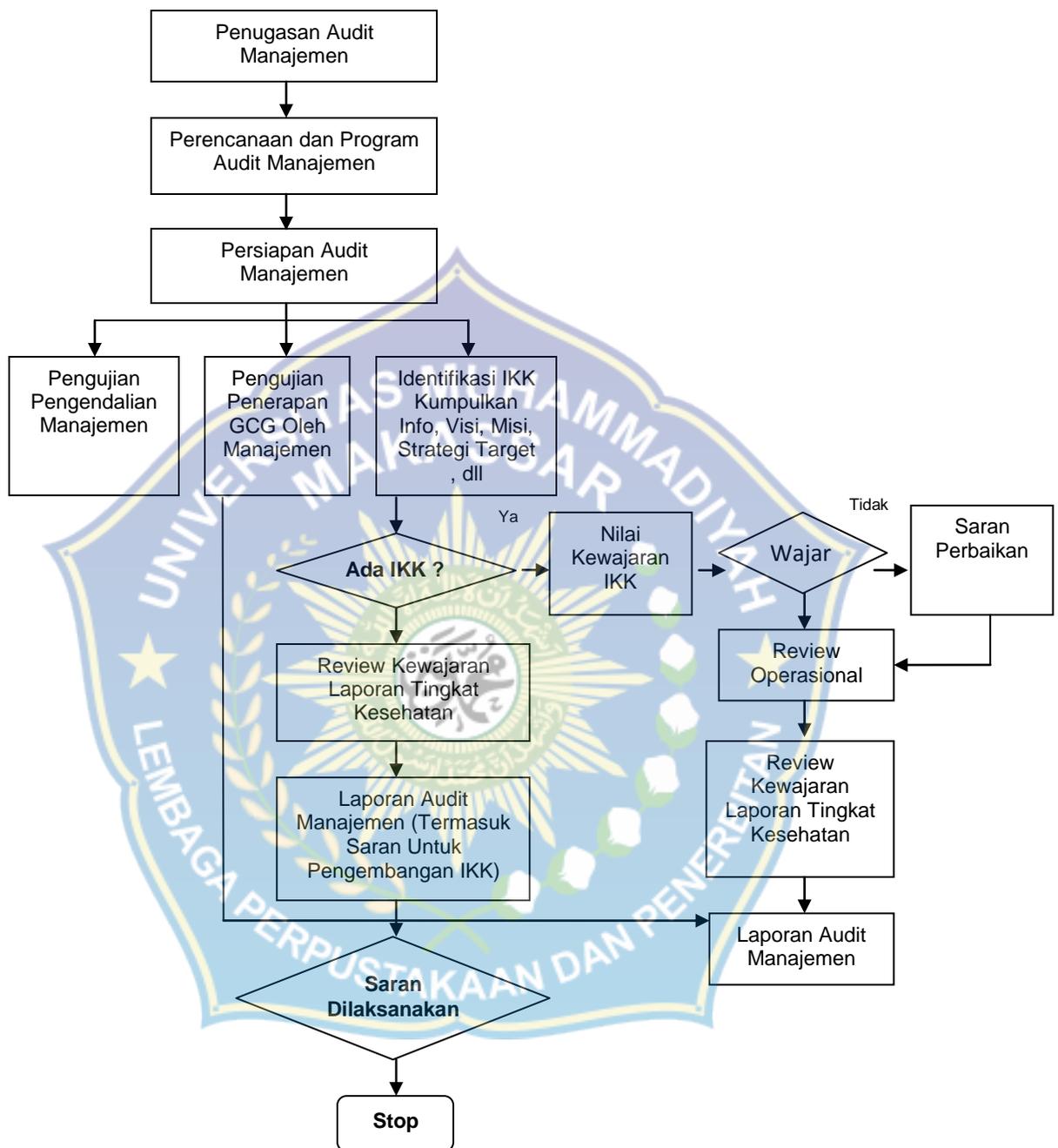
Audit manajemen di pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dilakukan oleh audit internal yang berkantor di Inspektorat daerah Kabupaten Bulukumba yang melakukan audit manajemen di kantor-kantor wilayah Kabupaten Bulukumba termasuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Audit manajemen dilakukan agar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dapat menilai kinerja dan melihat kelemahan-kelemahan sistem yang telah ditetapkan untuk dilakukan perbaikan, agar kelemahan tersebut tidak lagi di temukan dan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba meningkat. Yang menjadi objek utama audit manajemen pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba yaitu Standar Operasional (SOP) yang di

dalamnya termasuk sistem dan prosedur yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah melakukan penerimaan pendapatan Daerah.

Pelaksanaan audit manajemen yang dilakukan oleh tim audit internal pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten bulukumba dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan sistem dan prosedur tersebut audit manajemen yang dilakukan oleh tim audit internal akan memberikan rekomendasi atau pun saran mengenai sistem operasional Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengelola pendapatan daerah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.





Gambar 4.2
Sistem dan Prosedur Audit Manajemen

Audit manajemen dilakukan oleh tim audit internal setelah ada penugasan audit, baik penugasan yang sudah menjadi program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT), dimana tim audit internal yang melakukan audit manajemen sudah pernah melakukan pemeriksaan sebelumnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. Tim audit kemudian melakukan perencanaan dan pembuatan program Audit Manajemen sebelum mulai pemeriksaan dan dilanjutkan persiapan audit.

Tahap selanjutnya, Tim audit internal yang melakukan audit manajemen melakukan pengujian pengendalian manajemen untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian manajemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba yang meliputi efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya tim audit melakukan pengujian penerapan *good corporate governance* (GCG) oleh manajemen.

Pengukuran dan pengujian Indikator Kinerja Kunci (IKK), dimulai dengan pengembangan IKK yang tepat dan sesuai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. Indikator yang telah ditetapkan kemudian diukur, dihitung dengan menggunakan data yang tersedia. Dalam tahap ini termasuk pelaksanaan survei kepuasan wajib pajak dan survei kepuasan pegawai. Dari hasil survei tersebut dapat atau akan mengidentifikasi kesenjangan antara kinerja yang terjadi dengan yang diharapkan serta memungkinkan disusunnya rencana tindak lanjut untuk perbaikan.

Tahap review operasional. Dalam tahap ini perlu dilakukan pengukuran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dari aktivitas utama, sehingga dapat menghasilkan suatu langkah kerja perbaikan. Dari hasil pemeriksaan, tim audit melakukan pengumpulan bukti-bukti yang didokumentasikan dalam kertas kerja audit.

Pelaporan hasil pemeriksaan disampaikan dalam bentuk tulisan, yang berisi penyampaian hasil audit dan pemberian rekomendasi saran perbaikan bagi manajemen. Kemudian dilanjutkan dengan pemantauan tindak lanjut atas pelaksanaan dari rekomendasi saran yang diberikan oleh tim audit untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.

B. Hasil Penelitian

Audit manajemen yang dilakukan oleh audit internal pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba untuk menilai kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hasil wawancara berikut ini mengenai peranan audit manajemen dalam penerimaan pendapatan daerah, seperti yang di ungkapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Bapak A. Sufardiman bahwa :

“ee.. jadi di kantor kami itu ada sistem yang digunakan dalam melakukan penerimaan pendapatan, nah dari sistem itu maka itu audit manajemen berperan dalam mengawasi itu sistem, eee... jadi di sini itu semua pekerjaan yang kita lakukan disini selalu diawasi dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan di daerah Bulukumba, bisa dikatakan semua

pekerjaan itu yang kita lakukan di sini itu terkontrol dengan audit manajemen.” (Wawancara tanggal 06 Mei 2019)

Hal yang di ungkapkan oleh Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Bapak Abd Rahman bahwa :

“saya kira itu perannya audit sebagai pengawasan yang mengawasi kita dalam melakukan pekerjaan dalam meningkatkan pendapatan, ee.. karena kita disini ada sistem dalam melakukan penerimaan bukan melakukan asal-asalan tapi ada sistem nah dari sistem itulah di awasi sedemikian rupa dari audit, jadi kita juga dalam bekerja itu bersungguh-sungguh agar tujuan yang kita tetapkan itu dapat tercapai, tapi sebelum kita di awasi sama audit manajemen itu, disini juga pimpinan melakukan pengawasan.”(Wawancara tanggal 06 Mei 2019)

Hal yang tidak jauh berbeda juga di ungkapkan oleh salah satu staf bapak Tri Sultan Efendi mengungkapkan bahwa :

“emm peranannya itu dek dalam penerimaan pendapatan memeriksa serta mengawasi kita dalam melakukan pekerjaan kita di sini, seperti halnya dek semua penerimaan terawasi dengan baik.”(Wawancara tanggal 25 Juli 2019)

Jawaban yang serupa juga di ungkapkan oleh Bapak Awaluddin Asnur bahwa :

“Audit manajemen itu perannya dalam penerimaan ee,, kaya pengawasan, jadi kita itu dalam melakukan penerimaan juga terkontrol dengan baik, pengawasannya itu dilakukan terutama mengenai cara-cara pemungutannya itu pendapatan seperti apa, itu mi di awasi semua, jadi dalam melakukan pekerjaan kita tidak asal-asal maka dari itu bisamii meningkat pendapatanta di daerah.”(Wawancara tanggal 25 Juli 2019)

Pernyataan yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Harianto Hasyim bahwa :

“apadiih, saya pikir itu peranannya dek besar sekali karena itu bisa memeriksa segala kegiatan di sini, dalam artian kita di awasi dalam bekerja untuk meningkatkan penerimaan itu,, ee penerimaan pendapatan, jadi kita bekerja juga enak karena sistem yang di kantor jalankan sudah diawasi dengan baik, kalau pale ada kekurangan atau kelemahan bisa mi

di tau karena ada itu audit manajemen yang awasiki sama periksa itu sistem.”(Wawancara tanggal 25 Juli 2019)

Berdasarkan wawancara di atas maka peneliti simpulkan bahwa peran audit manajemen dalam penerimaan pendapatan daerah yaitu berguna dalam mengawasi sistem dalam penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba.

Audit manajemen sangat berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Berdasarkan hasil wawancara berikut ini dengan beberapa informan. Hasil wawancara yang dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Bapak Andi Sufardiman bahwa :

“ emm iye’ sangat berperan penting, karena kembalikan lagi sama perannya audit manajemen itu sebagai pengawasan, jadi kalau di kantor ini tidak ada yang awasiki maka proses dalam penerimaan pendapatan pasti tidak berjalan dengan baik, dan pasti mi orang yang bekerja tidak sesuai aturan terutama kebocoran-kebocoran pasti sering terjadi di BAPENDA.”(Wawancara tanggal 06 Mei 2019)

Hal yang di ungkapkan oleh Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Bapak Abd Rahman memaparkan bahwa :

“saya kira sangat penting sekali peranannya untuk meminimalisir kebocoran-kebocoran eemm untuk meningkatkan pendapatan, ee.. pertama untuk meningkatkan pendapatan kita maka kita akan melakukan audit dari audit itu, ee.. kita dapat melihat di mana kendalanya sampai pendapatan itu kecil, katakanlah kita turun melakukan uji petik pendapatan-pendapatan.”(Wawancara tanggal 06 Mei 2019)

Hal yang tidak jauh berbeda juga di ungkapkan oleh Staf Badan Pendapatan Daerah Bapak Tri Sultan Efendi bahwa :

“Kalau audit manajemen itu penting sekali peranannya dek, karena dengan adanya audit itu kita di sini bisa bekerja secara maksimal karena ada pengawasan dari itu audit, sehingga proses kita dalam bekerja bisa

berjalan efektif, eemm dalam artian bisa meminimalisir kecurangan dan juga penyimpangan yang lain, itu saja,.”(Wawancara tanggal 25 Juli 2019)

Bapak Awaluddin Asnur juga memaparkan hal yang sama bahwa :

“Iye sangat berperan penting bahkan penting sekali karena tanpa pengawasan dari audit manajemen itu, kita tidak akan bekerja dengan baik dan sistem di sini tidak akan berjalan dengan baik, eem satu lagi jika tidak ada audit manajemen kita tidak akan tau kalau ada keboran-keboran dan penyimpangan yang terjadi.”(Wawancara tanggal 25 Juli 2019)

Hal yang serupa juga di ungkapkan oleh Bapak Harianto Hasyim bahwa :

“Kalau berbicara masalah peran audit manajemen dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah saya kira sangat penting perannya, karena dengan adanya audit manajemen yang bertidak sebagai pengawasan, maka kita di sini di awasi agar kita bisa bekerja dengan maksimal dalam pengawasan yang dilakukan sama audit manajemen itu bisa melihat kesalahan-kesalahan kita sehingga kita bisa perbaiki untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita sebagai pegawai yang punya tanggung jawab tinggi juga merasa beruntung dengan adanya audit manajemen itu, eemm karena itu bisa digunakan untuk mengantisipasi kesalahan, kebocoran, tidak patuh aturan, jadi ee....audit manajemen itu bisa meminimalisir kebocoran-kebocoran apalagi di kantor ini ada namanya uji petik, jadi segala hal yang menjadi kendala dalam hal meningkatkan penerimaan pendapatan bisa kita tau.”(Wawancara tanggal 25 Juli 2019)

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa audit manajemen berperan sebagai pengawasan dalam penerimaan pendapatan. Pengawasan adalah sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang diharapkan mampu mendukung dalam pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

1. Tujuan dari fungsi pengawasan

- a. Adaptasi lingkungan. Tujuan utama dari fungsi pengawasan adalah agar suatu organisasi mampu terus beradaptasi dengan perubahan-

perubahan yang terjadi dilingkungannya baik itu lingkungan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

- b. Minimum kegagalan. Tujuan kedua dari fungsi pengawasan adalah untuk meminimumkan kegagalan.
 - c. Minimum Biaya. Tujuan ketiga dari fungsi pengawasan adalah meminimumkan biaya.
 - d. Antisipasi Kompleksitas Organisasi. Tujuan yang terakhir dari fungsi pengawasan adalah agar entitas dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks.
2. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses fungsi pengawasan
- a. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja ideal. Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu entitas atau organisasi sebaiknya ditetapkan dengan jelas dan lengkap pada saat perencanaan dilakukan.
 - b. Penilaian kinerja. Upaya yang dilakukan untuk membandingkan kinerja yang dicapai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - c. Membandingkan kinerja dengan standar. Setelah menetapkan bahwa yang akan dinilai adalah tingkat penerimaan pendapatan daerah setiap satu tahun sekali oleh audit manajemen, maka pada tahap ini audit manajemen akan melakukan perbandingan mengenai apa yang telah diperoleh dibagian penerimaan pendapatan daerah dengan standar yang telah ditetapkan.

- d. Melakukan tindakan koreksi jika terdapat masalah. Dalam proses pengawasan yang telah dilakukan melalui perbandingan antara kinerja dengan standar akan memperoleh informasi bahwa kinerja berada diatas standar atau sangat efektif.

3. Tipe-tipe Pengawasan

- a. Pengawasan Pendahuluan. Dirancang untuk mengantisipasi masalah atau penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
- b. Pengawasan pada saat kerja berlangsung. Pengawasan merupakan proses dimana aspek tertentu pada suatu prosedur harus disetujui terlebih dahulu atau syarat tertentu harus dipenuhi sebelum kegiatan dilanjutkan.
- c. Pengawasan umpan balik. Mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar yang ditentukan dan menemukan-penemuan diterapkan untuk kegiatan yang serupa dimasa yang akan datang.

Audit manajemen dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba tidak mengalami hambatan, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan berikut. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Bapak A. Sufardiman bahwa :

“ ALHAMDULILLAH, sejauh ini tidak adaji hambatan, karena yang lakukan audit manajemen di kantor kita itu sudah bagusmi cara pelaksanaannya, bisa dikatakan sudah maksimal dan efektifmi pelaksanaannya.”

Hal yang tidak jauh berbeda juga di ungkapkan oleh Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba bahwa :

“ saya kira tidak ada hambatan, kita dalam proses audit tidak ada hambatan karena semua data-data yang akan di audit semua sudah disiapkan oleh sasaran yang di audit, jadi data-data sudah tersedia semua sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada kendala dalam melakukan audit, orang-orang yang melakukan audit manajemen di BAPENDA ini juga sudah baik baik cara kerjanya dan pelaksanaannya.”

Bapak Tri Sultan Efendi staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba juga mengungkapkan hal yang sama bahwa :

“yang saya tau itu tidak ada hambatan, itu karena dalam pekerjaan kita di kantor sudah baik ditambah lagi itu juga tim audit semuanya orang yang berpengalaman jadi bisa bekerja secara maksimal, ee,, nah dari itulah mampu memberikan rekomendasi untuk kita di sini menyangkut kelemahan yang bisa menyebabkan tujuan dalam BAPENDA itu tidak tercapai,, itu saja..”(Wawancara tanggal 25 Mei 2019)

Pernyataan dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa audit manajemen telah dilaksanakan secara maksimal dan efektif. Adapun Langkah-langkah audit manajemen dalam memaksimalkan kinerjanya terdiri atas 5 lima langkah utama yang dilakukan dalam proses audit manajemen dan yang digunakan oleh organisasi dalam meningkatkan proses mereka.

1. Perencanaan Jadwal Audit. Bagian yang terpenting dalam suatu proses audit yaitu memiliki jadwal audit yang yang tersedia dan membiarkan semua orang mengetahui kapan setiap proses akan diaudit selama siklus yang akan datang (biasanya jadwal tahunan). Jika audit manajemen yang dilakukan tidak memiliki rencana audit atau melakukan audit secara mendadak akan

memberikan kesan bahwa kepala pimpinan sudah tidak percaya dengan pegawainya. Dengan menerbitkan jadwal audit, kesan yang disampaikan adalah bahwa tim audit datang untuk membantu suatu pihak manajemen untuk melakukan perbaikan. Hal ini dapat memungkinkan pihak instansi tersebut untuk menyelesaikan perbaikannya sebelum audit dilakukan, sehingga mereka mendapat informasi berharga tentang hasil pelaksanaan perbaikan yang telah mereka lakukan, atau meminta auditor untuk fokus membantu dan mengumpulkan informasi untuk melakukan perencanaan *improvement* di area lainnya.

2. Perencanaan proses audit. Langkah pertama dalam perencanaan audit adalah melakukan konfirmasi dengan pihak instansi kapan audit dilakukan. Rencana di atas lebih kepada pedoman seberapa sering proses akan diaudit dan kapan kira-kira akan dilakukan, tetapi dengan melakukan konfirmasi memungkinkan audit manajemen dengan pihak instansi untuk berkolaborasi dalam menentukan waktu terbaik dan secara bersama-sama meninjau hasil audit sebelumnya dan melihat apakah ada tindak lanjut yang diperlukan pada komentar atau masalah sebelumnya ditemukan, dan ketika pihak instansi dapat mengidentifikasi daerah yang perlu perbaikan maka auditor dapat melihat dan membantu pihak instansi tersebut untuk mengidentifikasi informasi yang diperlukan. Sebuah rencana audit yang baik dapat memastikan bahwa pihak instansi akan mendapatkan nilai tambah dari proses audit manajemen yang dilakukan.

3. Melakukan audit. Audit manajemen dimulai dengan pertemuan tim audit dan pihak instansi untuk memastikan bahwa rencana audit manajemen telah selesai dan siap. Maka ada banyak jalan yang dilakukan oleh tim audit untuk mengumpulkan informasi selama audit manajemen berlangsung seperti meninjau catatan-catatan yang berkaitan dengan operasional, berbicara dengan pegawai dan banyak lagi. Fokus utama dari kegiatan ini untuk mengumpulkan bukti bahwa proses ini berfungsi seperti apa yang telah direncanakan dan efektif dalam menghasilkan output yang dibutuhkan. Salah satu hal yang paling berharga yang dilakukan oleh tim audit manajemen bagi instansi yaitu tim audit tidak hanya melakukan identifikasi ke area-area yang tidak berfungsi dengan baik, tetapi juga menunjukkan proses yang mana saja yang dapat berfungsi lebih baik lagi jika dilakukan perbaikan.
4. Pelaporan Audit. Pertemuan penutupan dengan pihak instansi adalah suatu keharusan untuk memastikan bahwa aliran informasi tidak tertunda. Pihak instansi ingin mengetahui apakah ada kelemahan yang perlu ditangani. Ini harus diikuti dengan catatan tertulis yang dilakukan segera mungkin untuk memberikan informasi dalam format yang lebih permanen untuk membuat tindak lanjut dari informasi tersebut. Dengan melakukan identifikasi bukan hanya area-area yang tidak sesuai dengan proses, tetapi juga area positif dan area yang memiliki potensi. Pihak instansi akan mendapatkan nilai tambah yang lebih baik dari audit manajemen yang dilakukan, dengan melakukan perbaikan dari rekomendasi tersebut.

5. Tindak Lanjut. Seperti banyak standar manajemen mutu, tindak lanjut merupakan suatu langkah terpenting. Jika masalah telah ditemukan dan tindakan lanjut perbaikan telah dilakukan, lalu memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan berdasarkan temuan tersebut telah diperbaiki dan itu yang merupakan kunci dari perbaikan. Jika perbaikan telah dilakukan, maka proses selanjutnya adalah melihat seberapa banyak proses yang telah meningkat dari yang sebelumnya.

C. Peranan Audit Manajemen di Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan hasil bagian B diatas, bahwa dengan adanya audit manajemen yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba. Audit manajemen yang dilakukan oleh tim audit internal sangat berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba yang dilihat dari fungsi audit manajemen yang mengawasi kinerja Badan Pendapatan Daerah terutama mengawasi sistem dan prosedur dalam penerimaan pendapatan daerah.

“Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba adalah salah satu satuan kerja perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba. Dalam pengelolah keuangan daerah khususnya penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba dilakukan oleh PKK-SKPD dengan melalui sistem dan prosedur yang telah ditetapkan”.

a. Wajib pajak membayar pajak di Bank dengan dasar SSPD dan menyerahkan STS ke bendahara penerimaan.

- b. Bendahara penerimaan membuat dan menyampaikan LPJ Administratif dan bukti-bukti pendukungnya ke Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD setiap bulan.
- c. PPK-SKP memverifikasikan LPJ Administratif bendahara penerimaan dan membukukan transaksi penerimaan pajak daerah dan penyetorannya.
- d. Secara periodik, PPK-SKPD memposting jurnal ke buku besar.
- e. PPK-SKPD membuat neraca saldo dan laporan keuangan pada setiap akhir periode tertentu.

Berdasarkan adanya audit manajemen yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba maka penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba meningkat seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba

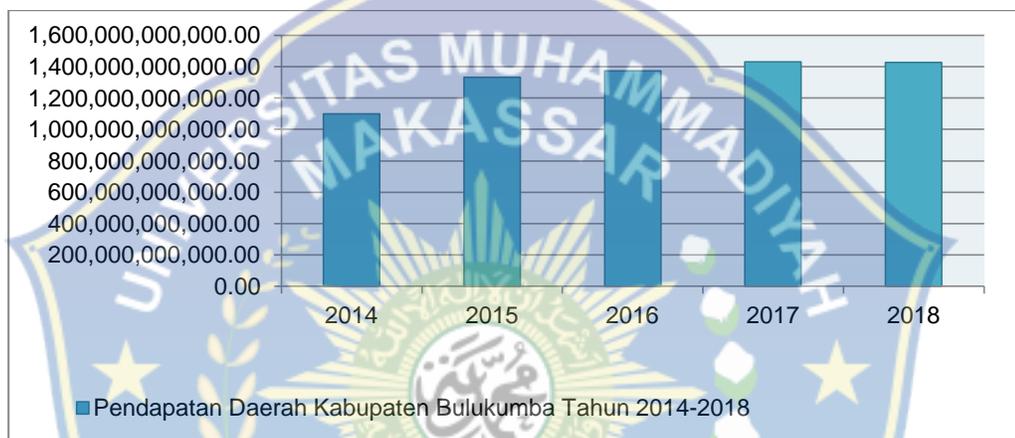
No	Tahun Anggaran	Pendapatan Daerah		(%)
		Anggaran	Realisasi	
1	2014	1,088,477,944,376.00	1,099,995,025,833.07	101.06
2	2015	1,331,962,405,570.00	1,332,345,752,332.80	100.03
3	2016	1,528,918,342,046.00	1.372,714,249,806.06	89.78
4	2017	1,543,657,553,185.43	1,431,800,027,268.32	92.75
5	2018	1,496,672,478,735.88	1,426,900,299,517,07	95.34

Sumber: Badan Pendapatan Daerah diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pendapatan daerah kabupaten bulukumba pada tahun 2014 sebesar Rp 1,099,995,025,833.07, pendapatan tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 1,332,345,752,332.80, pada tahun 2015. Pada tahun 2016 pendapatan meningkat sebesar Rp 1.372,714,249,806.06 kemudian pada tahun 2017

pendapatan masih mengalami peningkatan sebesar Rp 1,431,800,027,268.32 dan pada tahun 2018 pendapatan daerah menurun sehingga besarnya pendapatan daerah menjadi Rp 1,426,900,299,517,07. Mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 pendapatan daerah mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Sumber: Badan Pendapatan Daerah diolah, 2019

Gambar 4.3
Tingkat Pencapaian Pendapatan Daerah

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat tingkat penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

D. Pembahasan

Audit Manajemen pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dilakukan oleh auditor internal yang berkantor pada Inspektorat Kabupaten Bulukumba. Auditor internal tersebut melakukan audit ke seluruh

kantor-kantor di wilayah kabupaten Bulukumba, termasuk kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peran audit manajemen pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dapat dilihat dari beberapa unsur sebagai berikut :

1) Independensi

Independensi sangat perlu dimiliki oleh seorang auditor baik itu auditor internal maupun auditor eksternal. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan auditor internal yang melakukan audit manajemen di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba telah memiliki independensi yang sangat baik. Hal ini dikarenakan kedudukan tim audit dalam Kantor Badan Pendapatan Daerah berdiri sendiri dan tidak termasuk bagian dalam organisasi manajemen Badan Pendapatan Daerah dan tidak terikat pada divisi-divisi tertentu tertentu dan mengungkapkan pemikiran berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen.

Audit manajemen dilakukan secara bebas dan objektif terhadap semua bagian yang menjadi objek auditnya berdasarkan bukti-bukti yang diperolehnya agar benar-benar dapat memberikan rekomendasi yang akurat untuk membantu pihak manajemen Badan Pendapatan Daerah meningkatkan kinerjanya. Pihak manajemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba memberikan dukungan penuh kepada tim audit

internal yang melakukan audit manajemen dengan memberikan semua bukti-bukti yang diminta oleh tim audit tersebut.

Sikap independensi yang telah dilakukan tim audit internal yang melakukan audit manajemen pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba selalu mengedepankan sikap yang netral dan tidak memihak atau berpihak pada siapapun dalam melaksanakan audit manajemen, hal tersebut dapat dilihat pada saat melakukan audit manajemen tim audit mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung audit manajemen yang dilakukan tanpa melihat siapa yang menjadi objek audit.

2) Kemampuan Profesional

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tim audit internal Badan Pendapatan Daerah merupakan orang-orang yang berpengalaman dalam bidang audit. Selain itu, mereka juga adalah orang-orang yang memiliki pendidikan dan pengetahuan yang memadai tentang apa yang mereka kerjakan. Dan bukan hanya pengetahuan yang menyangkut masalah audit, tetapi juga mengenai kebijakan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kegiatan operasional organisasi.

Hasil penelitian juga didapatkan bahwa tim audit internal yang melakukan audit manajemen juga seringkali berkomunikasi dan berinteraksi dengan pihak-pihak atau karyawan yang menjadi objek auditnya. Dengan terpenuhinya kemampuan profesional tersebut, maka tim audit internal yang melakukan audit manajemen pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba mampu bertanggung jawab serta dapat memberikan

hasil kerja yang maksimal untuk membantu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba meningkatkan kinerjanya.

Pelaksanaan audit manajemen pada kantor Badan Pendapatan Daerah yang dilakukan oleh tim audit internal mampu mendeteksi kelemahan-kelemahan dalam kegiatan operasional Badan Pendapatan Daerah, seperti memberikan rekomendasi kepada Badan Pendapatan Daerah mengenai sistem pemungutan pajak yang kurang efektif dan efisien agar Badan Pendapatan Daerah menindaklanjuti rekomendasi dari audit manajemen untuk melakukan perbaikan mengenai sistem tersebut agar sistem dalam pemungutan pajak daerah berjalan sesuai undang-undang yang berlaku secara efektif dan efisien.

3) Ruang Lingkup Pekerjaan Audit Internal

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, audit manajemen yang dilakukan oleh tim audit internal pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba telah dilakukan secara menyeluruh mengenai aspek-aspek kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah yang mempengaruhi kinerja Badan Pendapatan Daerah tersebut. Selain itu, audit manajemen juga telah dilakukan terhadap rencana-rencana kerja serta pengendalian internal Badan Pendapatan Daerah sehingga audit manajemen tersebut dapat memberikan hasil dan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja secara menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Pemeriksaan audit manajemen oleh tim audit internal pada Badan Pendapatan Daerah meliputi semua yang menyangkut kegiatan operasional Badan Pendapatan Daerah seperti kinerja pegawai, standar pengendalian internal, sistem dan prosedur pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan kesesuaiannya terhadap hukum dan peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4) Pelaksanaan Audit Internal

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, pelaksanaan audit manajemen yang dilakukan oleh tim audit internal pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba sudah memadai. Sebelum tim audit datang ke kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba untuk melakukan audit manajemen telah dilakukan koordinasi dan komunikasi terlebih dahulu kepada kantor tersebut khususnya bagian-bagian yang menjadi objek audit yang akan diperiksa agar mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan nanti, agar proses audit manajemen yang dilakukan dapat berjalan lancar.

Pemeriksaan dilakukan dengan mengumpulkan semua bukti-bukti yang cukup kompeten dan relevan, serta melakukan evaluasi terhadap semua bukti dan informasi tersebut dan mengidentifikasi serta menyusun temuan-temuan dari hasil pemeriksaan tersebut. Setelah itu, tim audit internal yang melakukan audit manajemen memberikan rekomendasi kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba berdasarkan hasil temuan audit manajemen yang telah dilakukan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Bulukumba menerima rekomendasi dan saran tersebut untuk dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Audit manajemen dilakukan agar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dapat menilai kinerja pegawai serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada untuk dilakukan perbaikan dimasa yang akan datang. Audit manajemen berperan dalam proses penerimaan pendapatan daerah yang dilihat dari pendapatan disetiap tahun anggaran 2014-2018. Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan pada tahun 2014 sampai pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan pendapatan daerah.

Penurunan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba di tahun 2018 disebabkan karena penurunan Pendapatan Asli Daerah, penurunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba disebabkan karena tidak efektifnya realisasi pendapatan daerah di Kabupaten Bulukumba yaitu program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dalam pemungutan pajak yang belum optimal. Hal tersebut terjadi karena sistem dalam penerimaan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pemungutan pajak belum efektif dan efisien.

Sistem pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba dalam pemungutan pajak belum efektif dan efisien karena dalam proses sistem pemungutan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan Perda No 3 dan 4 Tahun 2012 yang mengatur tentang pajak, hal tersebut dikarenakan pada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba masih menggunakan sistem penetapan, sistem penetapan tersebut digunakan untuk beberapa jenis pajak seperti pajak restoran, pajak hotel dan cafe. Pajak-pajak tersebut masih menggunakan sistem penetapan karena sebagian besar Wajib Pajak (WP) belum menggunakan *Cash Register* meskipun ada beberapa Wajib Pajak yang menggunakan *Cash Register* tetapi tergolong masih kecil yaitu perbandingan 1:10. Selain dari itu, pemungutan pajak yang dilakukan masih menggunakan sistem menerka-nerka walaupun telah diadakan uji petik meskipun tidak sepenuhnya menerka-nerka dalam pemungutannya.

Beberapa usaha yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulukumba, meskipun Badan Pendapatan Daerah masih menggunakan sistem penetapan dalam pemungutan beberapa jenis pajak. Akan tetapi, usaha atau perbaikan-perbaikan terhadap sistem operasional Badan Pendapatan Daerah terus ditingkatkan agar sistem dan prosedur tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu usaha yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba yaitu bekerjasama dengan Bank Sulselbar Cabang Bulukumba melakukan pemasangan alat perekam Pajak Elektronik (e-POS) yang dipasang di beberapa titik seperti Warkop dan Cafe.

Penelitian ini menunjukkan bahwa audit manajemen berperan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bulukumba yang dilihat dari perbaikan-perbaikan sistem operasional dan kinerja yang terus

ditingkatkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah terutama dalam sektor pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Prawiranegara (2017) yang mendapati secara keseluruhan audit operasional yang memadai berperan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu sistem pengendalian intern dalam suatu organisasi, dengan adanya pelaksanaan audit operasional maka penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang menyebabkan ketidak efektifan dapat diperbaiki dan kelemahan atau kesalahan di masa yang akan datang tidak lagi ditemukan sehingga efektivitas pendapatan meningkat.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Audit manajemen yang dilakukan oleh tim audit internal pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba sudah memadai hal ini karena pelaksanaan audit manajemen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan audit manajemen dilakukan oleh tim audit internal yang berdiri sendiri dan terpisah serta tidak terlibat langsung dengan divisi-divisi struktur organisasi instansi.
2. Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 pendapatan daerah mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan.
3. Peranan audit manajemen dalam meningkatkan penerimaan pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba sangat berperan penting dalam mengawasi sistem dan prosedur dalam penerimaan pendapatan daerah, dengan adanya audit manajemen dapat membantu pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai tujuan Badan Pendapatan Daerah, hal tersebut dilihat dengan adanya perbaikan Sistem Operasional yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis dapat memberikan saran kepada pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dan peneliti selanjutnya, sebagai berikut :

1. Bupati

Perlunya meningkatkan pembinaan terhadap aparat pemerintahan sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintahan Kabupaten Bulukumba dan terbebas dari penyimpangan-penyimpangan, serta pemerintah harus benar-benar memperhatikan arah pembangunan yang dilaksanakan dan memberikan dorongan kepada aparat pemerintahan agar terus menunjukkan sikap proaktif kepada masyarakat agar program pelayanan dapat berjalan dengan baik.

2. DPRD

DPRD Kabupaten Bulukumba disarankan untuk lebih meningkatkan peninjauan di setiap instansi pemerintahan di Kabupaten Bulukumba sebagai bagian dari pengawasan kunjungan kerja pada berbagai instansi pemerintahan serta menindaklanjuti laporan masyarakat jika terdapat penyimpangan-penyimpangan penggunaan APBD oleh SKPD.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber atau referensi yang terkait dan dalam proses pengambilan dan pengumpulan data harus mempersiapkan diri. Peneliti selanjutnya diharapkan ditunjang pula

dengan instrumen wawancara menggunakan Internal Kontrol Kuesioner (ICQ) agar penelitian yang dilakukan lebih lengkap dan lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Aji, B.P, Kirya, I.K, dan Susila, 2015. Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen.Vol.2.*
- Arifah, D.A. 2012. Peranan Audit Kinerja (Audit Operasional) Pada Sektor Swasta Dan Pemerintah. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, Vol. 04, No. 03.
- Bayangkara, IBK. 2017. *Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi.Edisi 2* Jakarta: Salemba Empat.
- Elvira. 2011. *Audit Manajemen Atas Fungsi Keuangan*. Makassar : Universitas Hasanuddin Makassar
- Erawati, T. dan Rahmawati, N. 2016. Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Auntansi* , Vol.4, No.1.
- Halim Abdul, R. Y. (2010). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Octovido, I, Sudjan, N, dan Azizah, D.F. 2014. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bantu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis* ,Vol.15, No. 1.
- Kesek, Feisly. 2013. Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA* , 1922-1933. Vol 1, No.4
- Lamia, A.A, Saerang, D.P, dan Wokas, H.R. 2015. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* , Vol.15, No. 5.
- Mahsun, Sulistyowati, F, dan Purwanugraha, H. .2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mamuaja, Bejita. 2016. Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal EMBA* , Vol. 4, No.1.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.

- Novelya,S, Tinangon,J, dan Rondonuwu.S. 2016. Pengukuran Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA* , Vol.4, No.1.
- Prawiranegara. B. 2017. Analisis Peran Audit Operasional Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern Penjualan Pada PD.ACB Banjarsari. *Jurnal Ilmiah Edukasi*, Vol.5, No.2.
- Putra, B.F, Atmanto, D, dan Nuzula, N.F. 2014. Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar). *Jurnal Adminstrasi Bisnis*. Vol. 10, No. 1.
- Rahmawati dan Rusli.A. 2014. Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Penerapan Good Corporate Governance Pada Kab. Luwu. *Jurnal Equilibrium*, Vol. 04, No.02.
- Robert, Marbun. 2016. *Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah*.(<https://www.robertmarbun.com/2016/03/14/prinsip-pengelolaan-keuangan-daerah/>, diakses, 04 April 2019)
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukrisno, Agoes. 2017. *Auditing : Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sunanto. 2014. Peranan Audit Operasional Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengeluaran Kas Di PDAM Tirta Randik Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu (ACSY)*, Vol.1, No.1.
- Tarigan. Kharisma. 2013. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi PBB Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Kota Manado. *Jurnal EMBA* , Vol. 1, No. 3.
- Tinagon, J.J, Rondonuwu, R.H, dan Budiarmo, N. (2015). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pegelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA* , Vol. 3. No.4.
- Vika, Velika Hakim. 2015.*Audit Manajemen Atas Fungsi Sumber Daya Manusia (Studi Kasus PT. Bank Tabungan Negara Cabang Makassar)*. Makassar : Universitas Hasanuddin Makassar
- Wulandari, P.A, dan Iryanie, E. 2018. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil Wawancara
2. Surat Permohonan dan Keterangan Izin Penelitian



L

A

M

P

I

R

A

N



Hasil Wawancara

Informan 1

Waktu : 10 : 30
Tanggal : 06 Mei 2019
Tempat : Badan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba
Nama : Andi Sufardiman
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

1. Bagaimana peranan audit manajemen dalam penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba?

Informan : ee.. jadi di kantor kami itu ada sistem yang digunakan dalam melakukan penerimaan pendapatan, nah dari sistem itu maka itu audit manajemen berperan dalam mengawasi itu sistem, eee... jadi di sini itu semua pekerjaan yang kita lakukan disini selalu diawasi dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan di daerah Bulukumba, bisa dikatakan semua pekerjaan itu yang kita lakukan di sini itu terkontrol dengan audit manajemen.

2. Apakah audit manajemen sangat berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah?

Informan : emm iye' sangat berperan penting, karena kembali lagi sama perannya audit manajemen itu sebagai pengawasan, jadi kalau di kantor ini tidak ada yang awasiki maka proses dalam penerimaan pendapatan pasti tidak berjalan dengan baik, dan pasti mi orang yang bekerja tidak sesuai aturan terutama kebocoran-kebocoran pasti sering terjadi di BAPENDA.

3. Apakah audit manajemen dalam meningkatkan penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah mengalami hambatan ?

Informan :ALHAMDULILLAH, sejauh ini tidak adaji hambatan, karena yang lakukan audit manajemen di kantor kita itu sudah bagusmi cara pelaksanaannya, bisa dikatakan sudah maksimal dan efektifmi pelaksanaannya

4. Apa yang harus dilakukan agar audit manajemen dapat meningkatkan penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah ?

Informan : yang harus dilakukan itu kita di sini harus bekerja secara maksimal, ee.. dan harus lebih teliti lagi dalam mengawasi laporan-laporan yang menyangkut penerimaan pendapatan.



Informan 2

Waktu : 13 :25
Tanggal : 06 Mei 2019
Tempat : Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba
Nama : Abd Rahman
Jabatan : Sekretaris

1. Bagaimana peranan audit manajemen dalam penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah ?

Informan : saya kira itu perannya audit sebagai pengawasan yang mengawasi kita dalam melakukan pekerjaan dalam meningkatkan pendapatan, ee.. karena kita disini ada sistem dalam melakukan penerimaan bukan melakukan asal-asalan tapi ada sistem nah dari sistem itulah di awasi sedemikian rupa dari audit, jadi kita juga dalam bekerja itu bersungguh-sungguh agar tujuan yang kita tetapkan itu dapat tercapai, tapi sebelum kita di awasi sama audit manajemen itu, disini juga pimpinan melakukan pengawasan

2. Apakah audit manajemen sangat berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah?

Informan : saya kira sangat penting sekali peranannya untuk meminimalisir kebocoran-kebocoran eemm untuk meningkatkan pendapatan, ee.. pertama untuk meningkatkan pendapatan kita maka kita akan melakukan audit dari audit itu, ee.. kita dapat melihat di mana kendalanya sampai pendapatan itu kecil, katakanlah kita turun melakukan uji petik pendapatan-pendapatan

3. Apakah audit manajemen dalam meningkatkan penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah mengalami hambatan ?

Informan : saya kira tidak ada hambatan, kita dalam pelaksanaan audit tidak ada hambatan karena semua data-data yang akan di audit semua sudah di siapkan oleh sasaran yang di audit, ee.. jadi data-data sudah tersedia semua sehingga sudah dipastikan bahwa tidak ada kendala dalam pelaksanaan audit manajemen.

4. Apa yang harus dilakukan agar audit manajemen dapat meningkatkan penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah ?

Informan : eemm...yang kita lakukan itu berusaha bekerja secara baik dan maksimal terutama dalam mengawasan yang dilakukan untuk mengawasi penerimaan pendapatan daerah supaya lebih meningkat lagi.



Informan 3

Waktu : 09:25
Tanggal : 25 Juli 2019
Tempat : Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba
Nama : Tri Sultan Efendi
Jabatan : Staf

1. Bagaimana peranan audit manajemen dalam penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah ?

Informan : eem peranannya itu dek dalam penerimaan pendapatan memeriksa serta mengawasi kita dalam melakukan pekerjaan kita di sini, seperti halnya dek semua penerimaan terawasi dengan baik

2. Apakah audit manajemen sangat berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah?

Informan : Kalau audit manajemen itu penting sekali peranannya dek, karena dengan adanya audit itu kita di sini bisa bekerja secara maksimal karena ada pengawasan dari itu audit, sehingga proses kita dalam bekerja bisa berjalan efektif, eemm dalam artian bisa meminimalisir kecurangan dan juga penyimpangan yang lain, itu saja

3. Apakah audit manajemen dalam meningkatkan penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah mengalami hambatan ?

Informan : yang saya tau itu tidak ada hambatan, itu karena dalam pekerjaan kita di kantor sudah baik ditambah lagi itu juga tim audit semuanya orang yang berpengalaman jadi bisa bekerja secara maksimal, ee,, nah dari itulah mampu memberikan rekomendasi untuk kita di sini menyangkut

kelemahan yang bisa menyebabkan tujuan dalam BAPENDA itu tidak tercapai,, itu saja..

4. Apa yang harus dilakukan agar audit manajemen dapat meningkatkan penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah ?

Informan : yang pastinya kita lakukan itu bekerja secara maksimal, jujur dan mengedepankan tanggungjawab pastinya, selain itu dek, kita harus lebih apa yang menjadi tujuan kita dalam BAPENDA yaitu mengelola pendapatan secara optimal untuk kemajuan Bulukumba ke depannya.



Informan 4

Waktu : 10 : 15
Tanggal : 25 Juli 2019
Tempat : Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba
Nama : Awaluddin Asnur
Jabatan : Staf

1. Bagaimana peranan audit manajemen dalam penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah ?

Informan : Audit manajemen itu perannya dalam penerimaan ee,, kaya pengawasan, jadi kita itu dalam melakukan penerimaan juga terkontrol dengan baik, pengawasannya itu dilakukan terutama mengenai cara-cara pemungutannya itu pendapatan seperti apa, itu mi di awasi semua, jadi dalam melakukan pekerjaan kita tidak asal-asal maka dari itu bisamii meningkat pendapatanta di daerah.

2. Apakah audit manajemen sangat berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah?

Informan : iye sangat berperan penting bahkan penting sekali karena tanpa pengawasan dari audit manajemen itu, kita tidak akan bekerja dengan baik dan sistem di sini tidak akan berjalan dengan baik, eem satu lagi jika tidak ada audit manajemen kita tidak akan tau kalau ada keboran-keboran dan penyimpangan yang terjadi

3. Apakah audit manajemen dalam meningkatkan penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah mengalami hambatan ?

Informan : kalau masalah adanya hambatan dek sampai saat ini itu tidak adaji, karena baik kita sebagai staf juga orang-orang yang melakukan audit

itu sudah maksimal, kita juga di sini selalu menyiapkan apa-apa keperluan tim audit manajemen supaya bisa terlaksana audit manajemen dengan baik di BAPENDA ini.

4. Apa yang harus dilakukan agar audit manajemen dapat meningkatkan penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah ?

Informan : eemm yang pertama yang kita lakukan itu bekerja dengan baik, kita juga harus mengawasi penerimaan pendapatan secara menyeluruh baik dalam kantor maupun di luar kantor, itu semua dilakukan untuk mencapai tujuan kita meningkatkan pendapatan.



Informan 5

Waktu : 12 : 35
Tanggal : 25 Juli 2019
Tempat : Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba
Nama : Hariyanto Hasyim
Jabatan : Staf

1. Bagaimana peranan audit manajemen dalam penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah ?

Informan : apadiih, saya pikir itu peranannya dek besar sekali karena itu bisa memeriksa segala kegiatan di sini, dalam artian kita di awasi dalam bekerja untuk meningkatkan penerimaan itu,, ee penerimaan pendapatan, jadi kita bekerja juga enak karena sistem yang di kantor jalankan sudah diawasi dengan baik, kalau pale ada kekurangan atau kelemahan bisa mi di tau karena ada itu audit manajemen yang awasiki sama periksa itu sistem di kantor

2. Apakah audit manajemen sangat berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah?

Informan : Kalau berbicara masalah peran audit manajemen dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah saya kira sangat penting peranannya, karena dengan adanya audit manajemen yang bertidak sebagai pengawasan, maka kita di sini di awasi agar kita bisa bekerja dengan maksimal dalam pengawasan yang dilakukan sama audit manajemen itu bisa melihat kesalahan-kesalahan kita sehingga kita bisa perbaiki untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita sebagai pegawai yang punya tanggung jawab

tinggi juga merasa beruntung dengan adanya audit manajemen itu, eemm karena itu bisa digunakan untuk mengantisipasi kesalahan, kebocoran, tidak patuh aturan, jadi ee....audit manajemen itu bisa meminimalisir kebocoran-kebocoran apalagi di kantor ini ada namanya uji petik, jadi segala hal yang menjadi kendala dalam hal meningkatkan penerimaan pendapatan bisa kita tau

3. Apakah audit manajemen dalam meningkatkan penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah mengalami hambatan ?

Informan : saya kira sejauh ini tidak ada hambatan, baik itu pelaksanaan audit manajemen sudah berjalan cukup baik, kita juga selalu mendukung pelaksanaannya jadi bisa berjalan dengan baik, ee.. ketika kita mendukung pelaksanaan audit maka hasilnya juga akan baik dan pasti tidak akan ada kendala yang akan kita dan tim audit hadapii.

4. Apa yang harus dilakukan agar audit manajemen dapat meningkatkan penerimaan pendapatan Pemerintah Daerah ?

Informan : ee..yang harus kita lakukan itu dengan melakukan peningkatan kinerja dengan menyadari kalau yang kita lakukan itu selalu diawasi dan harus kita pertanggungjawabkan,



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Telp. (0413) 81002 Bulukumba

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : **303** /BPD/VI/2019

Berdasarkan surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Nomor 150/DPMPSTP/IV/2019 tanggal 29 April 2019 perihal izin penelitian, maka yang tersebut dibawah ini

Nama : RISMAWATI

Nomor Pokok : 10573 0536515

Program Studi : Akuntansi

Alamat : Jl. Sultan Alauddin II Lr. 3 Makassar

Benar bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian/ pengambilan data di Kantor Badan Pendapatan Daerah dalam rangka penyelesaian tugas akhir/ penyusunan skripsi pada Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul ***"Peranan Audit Manajemen dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba"***

Demikian surat keterangan ini di buat untuk diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukumba, 10 Juni 2019

KEPALA BADAN

A. SUFARDIAN, SH. M.Si

Pangkat Pembina Tk. I

Nip : 19730215 200003 1 005

BIOGRAFI PENULIS



Rismawati panggilan Risma lahir di Bulukumba pada tanggal 19 Februari 1997 dari pasangan Bapak Muh. Jafar dan Ibu Niar. Peneliti adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jln. Dato Tiro RT/RW 000/000 Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 11 Kalumeme lulus tahun 2009, SMP Negeri 3 Ujung Loe lulus tahun 2012, SMA Negeri 9 Bulukumba lulus tahun 2015, dan mulai tahun 2015 mengikuti program S1 Akuntansi di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH)

